



Laporan Triwulan II

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021



Pemerintah Kota Bogor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor pada periode 2019-2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan tahapan pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 147 menyebutkan bahwa:

1. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 pada periode berkenaan yaitu periode tahapan ke -4 pembangunan jangka menengah Tahun 2019-2024, serta mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota Bogor dengan pembangunan daerah propinsi Jawa Barat.
2. Selain itu, RKPD Kota Bogor Tahun 2021 disusun berpedoman pada RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024, RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020, Rancangan RKP Tahun 2020 serta program strategis nasional.
3. Dalam penyusunan RKPD , DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaean pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Korta Bogor Tahun 2019-2024.

Proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2019-2024 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2021, RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021, dan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Hasil telaahan terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 melalui forum Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang kemudian disebut sebagai Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2021.

3. Penyusunan RKPD merupakan hasil dari tahapan awal proses perencanaan yang bersifat partisipatif, yang dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan (dilaksanakan pada Bulan Desember 2019) dan Musrenbang Tingkat kecamatan (dilaksanakan Pada Bulan Februari 2020).
4. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 dibahas secara intensif melalui rangkaian pembahasan Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan pada Bulan Februari 2020), dan Pramusrenbang berupa sidang kelompok berdasarkan kelompok urusan Sosial Budaya, Pemerintahan, Fisik dan Infrastruktur, serta ekonomi (dilaksanakan pada Bulan Maret 2020). Dalam sidang kelompok sebagaimana dimaksud, Rancangan Renja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah melalui mekanisme teknokratis sudah dipaduserasikan dengan usulan kegiatan yang bersifat partisipatif yaitu usulan kegiatan masyarakat dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, usulan kegiatan yang bersifat *top down*, dan usulan kegiatan yang bersifat politis baik itu aspirasi pokok pokok pikiran DPRD maupun janji-janji politis kepala daerah dengan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
5. Selanjutnya hasil sidang kelompok dalam pra musrenbang tersebut yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 dan disampaikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam musrenbang tingkat Kota dan (dilaksanakan pada Bulan Maret 2020).
6. Penyusunan dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2021 berpijak kepada Rancangan RKPD yang telah disampaikan pada saat musrenbang tingkat kota, hasil Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Walikota Bogor tentang RKPD 2021. Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui SIPD serta dilakukan dengan pendekatan logical framework untuk fokus

prioritas kegiatan yang disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah kabupaten/kota, propinsi dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Evaluasi RKPD tercantum Pasal 306 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka*

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berbunyi Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota. Pada ayat 4 di pasal yang sama juga disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota. Ditinjau dari segi metode, disebutkan dalam Pasal 305 Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi RKPD dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah supaya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 20 20 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bogor;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2010 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah melalui eraturan daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2021.

Adapun tujuan evaluasi ini adalah memberi gambaran sejauh mana program, kegiatan, dan subkegiatan tercapai atau tidak tercapai, beserta kendala yang diharapkan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RKPD 2021 sampai dengan Triwulan II, agar target rencana program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi maupun nasional. Dengan dilakukannya evaluasi maka dapat dilakukan antisipasi maupun perubahan yang diperlukan jika program/kegiatan/subkegiatan yang telah dilakukan terkendala atau tidak

sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi pada laporan ini tergolong evaluasi formatif. Ketentuan evaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 merupakan tahapan untuk melakukan evaluasi formatif karena mengacu pada peraturan yang ada.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Bogor Triwulan II Tahun 2021 disajikan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BOGOR

- 2.1 Visi dan Misi Kota Bogor
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Kota Bogor
- 2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
- 2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021

BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

- 3.1 Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2021
- 3.3 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional
- 3.4 Telaahan Kebijakan Nasional

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

- 4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2 Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BOGOR

2.1. Visi dan Misi Kota Bogor

2.1.1 Visi Kota Bogor

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.

2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Konteks mewujudkan Kota yang Ramah keluarga, Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana suatu kota memiliki daya dukung terhadap kehidupan keluarga yang dapat diukur salah satunya dengan melihat seberapa besar ketahanan keluarga yang tinggal dalam lingkungan kota tersebut. Ketahanan keluarga (family strength atau family

resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Selanjutnya, dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (small scale system) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (characteristics of the small scale system) yang disebut sebagai Faktor

Komunal (Communal Factors). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (large scale system) yang disebut sebagai Faktor Sosial (Societal Factors).

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber

daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

2.1.2. Misi Kota Bogor

Berikut ini adalah penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2021 untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -1 yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 6 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.
2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Indeks Pembangunan Olahraga.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan

sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.

4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air
5. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.
6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik

Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -2 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu untuk Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People), maka ada 4 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama

sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai rata-Rata USBN SD, dan Nilai Rata-rata UN SMP.

2. Meningkatnya kualitas generasi muda; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
3. Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government) maka ada 2 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan Smart City.

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mendukung pencapaian Misi ke -3 yaitu Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera.

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

B. Sasaran Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu untuk Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat ,maka ada 3 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Menurunnya tingkat kemiskinan; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK).

Sementara itu, untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas yaitu untuk Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah maka ada 3 sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita, dan Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
2. Terkendalinya tata ruang;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.
3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.

2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bogor periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025.

Dalam rangka penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka, dalam bab ini akan dijelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kota Bogor Tahun 2005-2005, arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2019-2024, serta Arah Kebijakan RPJMD Propinsi Jawa Barat sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor yang tertuang dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2021. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024 adalah ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.

Selanjutnya tema ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD 2019-2024 menjabarkan tema tersebut dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, yang menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam setiap RKPD sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Adapun tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 dan penjabarannya pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005 – 2025



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Selanjutnya pada tahapan pembangunan jangka menengah ke-4 (Tahun 2019-2024) sebagaimana dimaksud diatas, untuk menuju pada terwujudnya kemandirian masyarakat dan dengan memperhatikan tema visi kota Bogor pada tahun 2019-2024 yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah Terpilih periode 2019-2024, maka disusunlah tahapan pembangunan jangka pendeknya yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam setiap RKPD pada periode 2019-2024. Fokus/Tema pembangunan jangka pendek sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Fokus/Tema Tahapan RKPD Periode 2019-2024



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Prioritas pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2021 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap:

1. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan keselarasannya dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang berkembang di tingkat Propinsi Jawa Barat dan di tingkat Nasional;
2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2021;
3. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Rancangan RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021;
4. Arah Kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024;
5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sesuai target rencana tahun 2021;
6. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2019;
7. Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan Kota Bogor Tahun 2021.

Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2021 sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat. Tema Tersebut dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2. Pembangunan Infrastruktur untuk Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi lokal
3. Penguatan Reformasi Birokrasi

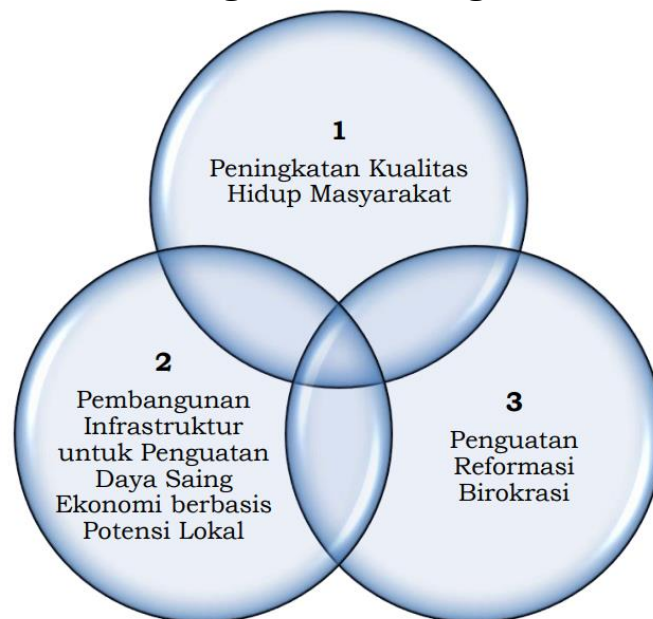
Dampak berkembangnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2021. Oleh karenanya seiring dengan perubahan tema RKP dan RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021, maka telah dirumuskan pula perubahan tema RKPD Kota Bogor Tahun 2021 dalam rangka lebih memfokuskan rencana pembangunan daerah Kota Bogor untuk pemulihan sosial ekonomi dan penguatan system Kesehatan daerah Kota Bogor.

Adapun Perubahan rumusan Tema RKPD Kota Bogor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2021
“ Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat melalui percepatan pemulihan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat serta penguatan sistem Kesehatan Daerah”

Selanjutnya Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021 tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2021



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2020

Dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan yang akuntabel sebagai bagian dari perwujudan reformasi birokrasi, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ini harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada di Kota Bogor dan sinergis menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada di tingkat propinsi Jawa Barat dan di Tingkat Nasional. Untuk itu perlu dijabarkan keterkaitan permasalahan dan Isu strategis Kota Bogor dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek.

Gambar 2.4
Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan
Kota Bogor pada Tahun 2021



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2020

2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021

**Tabel 2.2 Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Yang disertai Pagu Indikatif
PENJABARAN MISI 1 : MEWUJUDKAN KOTA SEHAT**

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL 2018	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
					2021		2022				
					Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)			
1. Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT											
1.1.	Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73.96		74.25				
			Point	49,6	49,7		49,8				
			Point	85.86	86		86,1				
1.1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73.96		74.25				
1	Program 1.1.1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1 Indeks Keluarga Sehat	Point	0,32	0,57	46.945.000.000	0,64	91.256	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
		2 Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	85%		90%				
		3 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	31%		38%				
		4 Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	95,85	97%		98%				
		5 Persentase fasilitas kesehatan yang Terakreditasi	%	4	16% (4pusk)		20% (5 pusk)				
2	Program 1.1.1.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	6 Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	60	50	1.550.000.000	45	7.000			
		7 Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	2,99	2,94		2,92				
		8 Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3,35	3,34		3,33				
		9 Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	%	4,9	3,67		3,38				
		10 Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	%	8,3	8,2		8,1				
		11 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	%	4,8	4,7		4,65				
		12 Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	%	2,08	1,86		1,75				
		13 Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	%	4,53	4,31		4,2				
3	Program 1.1.1.3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	14 Persentase kesembuhan TB Paru	%	81,22	86	1.220.000.000	87	10.000	Dinas Kesehatan		
		15 Prevalensi HIV Aids	%	0,42	<0,5		<0,5				

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
					2018	2021		2022			
						Target	Rp. (dln Juta)	Target			Rp. (dln Juta)
		16	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66	62,5		62		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
		17	Prevalensi Hipertensi	%	9,67	9		8,8			
		18	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,4	2,3		2,25			
		19	Angka Kesakitan ODGJ	%	≤ 0,13	≤ 0,13		≤ 0,13			
4	Program 1.1.1.4	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	20	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	70	84%	21.997.000.000	88%	49.405	Dinas Kesehatan
			21	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	80	90%		95%		
			22	Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk	Per 30.000 penduduk	0,68	0,67		0,7		
			23	Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	%	72	77%		79%		
		24	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar Kesehatan	%	70,86	87		90			
5.	Program 1.1.1.5	Pengembangan Data dan Informasi	25	Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health	%	50%	65%	400.000.000	75%	1100	
6	Program 1.1.1.6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	26	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	%	35%	65%	250.000.000	85%	800	
7	Program 1.1.1.7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	27	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	73,5	84,5	850.000.000	84,75	431.129	RSUD
8	Program 1.1.1.8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	28	Persentase capaian SPM RSUD	%	93,45	93,8	175.000.000.000	93,85	200.916	
			29	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	Point	3,66	3,7		3,72		
9	Program 1.1.1.9	Kesehatan Reproduksi Remaja	30	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Per 1000 Remaja	14,42	14,4	175.177.000	14,39	500	DPPKB
			31	Persentase PIK R Aktif	%	PIKR Aktif = 24 PIKR = 59 Persentase PIK R Aktif = 40,68%	43,48		44,59		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021		
					2018	2021		2022				
						Target	Rp. (dln Juta)	Target			Rp. (dln Juta)	
10	Program 1.1.1.10	Kependudukan dan Keluarga Berencana	32	CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>) Tingkat Peserta KB Aktif	%	Peserta Aktif (PA) = 120.210 PUS = 155.284 CPR = 77,41	77,42%	1.792.963.000	77,42%	3.250		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			33	Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	%	Peserta MKJP = 34.725 PUS = 155.284 Persentase MKJP = 22,36%	22,44		22,48			
11	Program 1.1.1.11	Peningkatan Ketahanan Pangan	34	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	84,9	87,9	837.000.000	88,9	2.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			35	Konsumsi energi	Kkal/Kapita/Hari	1809	1980		2040			
			36	Konsumsi protein	gr/kapita/Hari	50,8	54		55			
			37	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman	%	91,53	93,5		94			
12	Program 1.1.1.12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	38	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	Kasus	0	3	350.000.000	3	890		
			39	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,2	21		20			
13	Program 1.1.1.13	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	40	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	27,28	29,76	300.000.000	30,03	400		
	SASARAN 2 : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	69		70			
			2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,47		0,49			
1	Program 1.1.2.1	Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	41	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)	%	66	69	7.230.000.000	70	10.125	Dinas Kesehatan	
			42	Persentase Rumah sehat (%)	%	78,01	79,5		80			
2	Program 1.1.2.2	Kemitraan Lingkungan Hidup	43	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	30	33	0	35	3.050	Dinas LH	
			44	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	%	jumlah kerjasama =	20		30			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
3	Program 1.1.2.3	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	45	Presentase penegakan PERDA KTR	%	90	95	1.381.000.000	95	85	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
4	Program 1.1.2.4	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	46	Persentase Sekolah Sehat (%)	%	13	17	-	19	86	Dinas Pendidikan	
5	Program 1.1.2.5	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	47	Persentase PAUD Sehat	%	31	33	300.000.000	34	95		
6	Program 1.1.2.6	Kepemudaan dan Keolahragaan	48	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Point	0,45	0,47	2.667.808.000	0,49	1.320	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
			49	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per 916,052 Penduduk	0.001511 : 2.08	0.001661 : 2.08		0.001734 : 2.08			
			50	Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	33,34	#REF!		#REF!	49.789		
			51	Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	Angka	1	1		1			
SASARAN 3 :	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91,98	94,86		96,85				
		2	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67,21	70,42		72,06				
		3	Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,62	2,27		2,12				
		4	Persentase Reduksi Sampah	%	6,26	6,6		6,8				
1	Program 1.1.3.1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	52	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91,98	94,86	9.350.000.000	96,85	8.500	Dinas PUPR	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			53	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang Aman	%	67,21	70,42		72,06	155.850		
2	Program 1.1.3.2	Lingkungan Sehat Perumahan	54	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	Ha	310,93	269,51	71.450.000.000	251,14	5.200	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			55	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	Ha	54,49	34,26		24	23.945		
			56	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	Ha	146,42	89,95		56,4		Dinas Perumahan dan Permukiman	
			57	Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang ber kondisi baik	%	50,73	71,25		73,64			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dmln Juta)		
			58	Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	%	28,97	58,31		62,75		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
			59	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	%	75,45	85,34		85,72			
			60	Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	%	58,51	74,97		78,49			
			61	Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	%	76,93	81,55		83,54			
			62	Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	%	56,87	75,76		77,09			
			63	Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	%	23,84	47,97		50,6			
			64	Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor	Ha	365,94	221,55		144,75			
3	Program 1.1.3.3	Peningkatan Utilitas Perkotaan	65	Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU	%	74,03	75%	75.545.818.600	75,61%	4.730		
			66	Persentase PJU yang terpelihara	%	81,09	73,05%		68,99%	58.920		
4	Program 1.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan	67	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi Baik	%	44,64	60,60	36.382.400.448	68,58	98.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			68	Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik	Km	20,31	29,18		33,62			
			69	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	0	60		90			
			70	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	Lokasi	745	985		1105			
5	Program 1.1.3.5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	71	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	2018 = 11 2019 = 5	2	815.000.000	2	300	BPBD	
			72	Jumlah Sekolah Aman bencana	Sekolah	2018 = 12 2019 = 4	2		2	300		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dmln Juta)		
6	Program 1.1.3.6	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	73	% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan ber kondisi baik	%	2018 = 34 2019 = 40/26000	60	992.000.000	70	48.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
7	Program 1.1.3.7	Pemulihan Pasca Bencana	74	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	40	65	0	70	3000	Dinas PUPR	
			75	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	0	2	500.000.000	2	2.631	Dinas Perumkim	
8	Program 1.1.3.8	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	76	jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	Lokasi	27	8	26.500.000.000	8	2.520	Dinas PUPR	
9	Program 1.1.3.9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	77	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%	75,85	76,5	25.910.052.000	77	43.761	Dinas LH	
			78	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,8		48,8			
			79	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,5 Milyar	2,1		2,1			
10	Program 1.1.3.10	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	80	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,26	6,6	2.200.000.000	6,8	4.406		
			81	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	%	4	4,2		4,4			
11	Program 1.1.3.11	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	82	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA	%	98,16	98,16	20.925.915.000	98,16	84.766		
			83	Kapasitas pengolahan sampah	Ton/hari	931	949		966			
SASARAN 4 : Terkendalinya sumber-sumber pencemar air				Indeks Kualitas Air	Point	49,6	49,7		49,8			
1	Program 1.1.4.1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	85	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	35	37	2.402.950.000	38	700	Dinas LH	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			86	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat at adanya dugaan pencemaran air =	100		100	180		
			87	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30	45		50	150		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021			
				2018	2021		2022						
					Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)					
		88	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	30	35		40	900		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		
2	Program 1.1.4.2	Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	89	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	%	10	10	1.250.000.000	10	900			
3	Program 1.1.4.3	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	90	Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	45,83	60,00	-	61,25	2.660	Dinas PUPR		
			91	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	%	90	92,06		93,10	23.000			
	SASARAN 5 : Terkendalnya sumber-sumber pencemar udara		1	Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	86		86,1				
1	Program 1.1.5.1	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	92	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)	%	100	100	925.000.000	100	375	Dinas Perhubungan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
			93	Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	%	40	40		50	250			
			94	Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	%	87,82	89		90	165			
			95	Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi	Angka	1	3		4	1.675			
2	Program 1.1.5.2	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	96	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	40	55	2.402.950.000	60	1.100	Dinas LH		
			97	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti	%		100		100				
			98	Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	%	12 titik berkondisi baik	60		70				
3	Program 1.1.5.3	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	99	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	emisi GRK = 2,8	5,87	1.077.000.000	7,11	700			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021		
					2018	2021		2022				
						Target	Rp. (dln Juta)	Target			Rp. (dln Juta)	
	SASARAN 6 :	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,89	5,92		5,94				
1	Program 1.1.6.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	Luas RTH Publik = 708,63 Ha	1,1	16.766.000.000	1	6.020	Dinas Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			101	Luas RTH Publik yang dikelola dengan baik (Ha)	Ha	Luas RTH yang dikelola dengan baik = 41,86 Ha	45,08		46,18	15.002		
2	Program 1.1.6.2	Pengelolaan Areal Pemakaman	102	Luas TPU Hijau yang dikelola dengan baik (Ha)	Ha	Luas TPU Hijau Terkelola = 46,2	46,34	3.939.632.000	46,41	4.893		
3	Program 1.1.6.3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	103	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	Luas Kawasan konservasi = 0,5	0,5	0	0,5	900	Dinas LH	

PENJABARAN MISI 2: MEWUJUDKAN KOTA CERDAS

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021		
					2018	2021		2022				
						Target	Rp. (dln Juta)	Target			Rp. (dln Juta)	
2	Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS											
2.1.	Tujuan 2.1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1 Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,3	10,97		11,31					
			Tahun	13,38	13,9		14,2					
			Point	NA	59.13		62.09					
			Point	600	611-620		621-630					
			Point	67.37	70.5		71.5					
2.1.1	SASARAN 2.1.1 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	1 Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,3	10,97		11,31					
			Tahun	13,38	13,9		14,2					
			Point	68.12	76,04		76,06					
			Point	58.27	67,79		67,81					
1	Program 2.1.1.1. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	1 APK PAUD	angka	49,04	50,55	93.937.000	51	1.823	Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		
			2	2 APK SD	angka	112,4	113,05	80.800.197.400			113,08	48.000
					3	3 APK SMP	angka	104,1			104,8	
			4	4 Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik	%	93,7	94,8				95	94.000
					5	5 Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik	%	94,7			95	
			6	6 Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	76,04				76,06	810
					7	7 Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27			67,79	
3	Program 2.1.1.3. Pendidikan non formal	8	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi			815.593.600			Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		
			-	Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang Terakreditasi	%	33	35				48.000	48.000
			-	Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi	%	50	52				53	500
			9	9 Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan	%	0	100				100	
4	Program 2.1.1.4. Manajemen Layanan Pendidikan	10	Prosentase Sekolah terakreditasi A			3.943.207.000			Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		
			-	TK Terakreditasi A	%	38	40				42	1320
			-	SD Terakreditasi A	%	73	75				76	
			-	SMP Terakreditasi A	%	73	75				76	
5	Program 2.1.1.5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	67	68,9	7.991.225.000	69,0	7.150	Dinas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
			12	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	19	21		23			545

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
			13	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	53	55		56	9.200		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			14	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	53	55		56	3.300		
			15	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional	orang	1	2		2	445		
	SASARAN 2 :	Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	59.13		62.09			
1	Program 2.1.2.1	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO	15	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	%	2018 = 75 2019 = 76	78	446.272.000	79	1.400	DPMPPA	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			16	Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	2018 = 0,0240 2019 = 0,0136	0,0128		0,0122			
2	Program 2.1.2.2	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	17	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat	Madya	Nindya	107.717.000	Utama	2.250		
3	Program 2.1.2.3	Manajemen Layanan Pendidikan	18	jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional	orang	61	64	-	65	1945	Dinas Pendidikan	
4	Program 2.1.2.4	Pengelolaan Keragaman Budaya	19	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya	%	jumlah pelaku seni budaya =	10	8.093.067.000	10	1.215	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			20	jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggiri /Lomba/Sayembara Karyaseni	Event	13	17		19	3035		
			21	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	Angka	100	150		150	600		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			22	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	%	Jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestarian budaya =	2			2	2750	
6	Program 2.1.2.6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	59	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	Angka	0,00015	0,00011	90.000.000	0,0009	250	Badan Kesbangpol	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dlm Juta)	Target	Rp. (dmln Juta)		
7	Program 2.1.2.7	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	60	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	%	Jumlah tempat menjual miras ilegal = 178	118	0	98	150	SatpolPP	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			61	Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	%	70	90	90				
8	Program 2.1.2.8	Manajemen layanan Pendidikan	62	Persentase Pelajar Bebas NAPZA	%	100	100	155.224.000	100	245	Dinas Pendidikan	
			63	penurunan kejadian tawuran pelajar	kejadian	20	18		17			
9	Program 2.1.2.9	Kepemudaan dan Keolahragaan	64	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	%	jumlah pemuda pengguna NAPZA = 162	5	938.516.000	5	2.250	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
			65	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%	Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5	40		60			
			66	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	Predikat	0%	40 % Menuju KLP		50% Menuju KLP			
10	Program 2.1.2.10	Peningkatan Olah Raga Prestasi	52	Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	Medali	4	3	922.956.000	4	23.301		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			53	Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	Medali	14	16		0			
			54	Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	Medali	162	32		264			
11	Program 2.1.2.11	Pembinaan Anak Terlantar	67	Persentase penurunan anak terlantar	%	Jumlah anak terlantar = 385 orang	38,96	75.000.000	58,44	225	Dinas Sosial	
12	Program 2.1.2.12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	68	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	Jumlah anjal, gepeng dan WTS = 397	23,92	202.225.000	26,44	750		
			69	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya = 550	8		9			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
13	Program 2.1.2.13	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	70	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan	%	jumlah kunjungan ke perpustakaan = 25,421	35	396.536.000	42	75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
14	Program 2.1.2.14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	71	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	-	100	10.609.440.000	100	200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.1.3	SASARAN 3 :	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	611-620		621-630			
1	Program 2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan	38	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	0	2	1.534.430.000	2	2100	Bappeda	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			39	Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	0	10,5		10,5			
				Jumlah Hasil Kelitbangan	angka	Tahun 2018 = 17 inovasi Tahun 2019 = 50 inovasi Total hingga 2019 = 67 inovasi	10	10				
			40	Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.	%	Tahun 2018 = 34 inovasi Tahun 2019 = 8 inovasi Total hingga 2019 = 42 inovasi	7	7				
2.1.4	SASARAN 4 :	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	70.5		71.5			
			2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	NA	71		71,5			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
1	Program 2.1.4.1	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	41	Persentase perempuan berpolitik (%)	%	17	18	101.589.000	19	1.750	DPMPPA	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			42	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	2018 = 70 2019 = 75	80		82			
2	Program 2.1.4.2	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	43	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)	%	Jumlah panti asuhan/yayasan = 83	100	10.135.000	100	150	Dinas Sosial	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			44	Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	%	Jumlah Panti Asuhan/Yayasan/Orsos = 83	24,09		36,14			
3	Program 2.1.4.3	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	45	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma = 970 orang	37,32	135.000.000	45,05	450	Dinas Sosial	
			46	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	2 Kasus	100		100			
4	Program 2.1.4.4	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	47	Jumlah lansia yang berdaya	Orang	150	100	809.000.000	100	100		
5	Program 2.1.4.5	Perencanaan Pembangunan Daerah	48	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20 : 100	22 : 100	1.350.000.000	25: 100	565	Bappeda	
			49	Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1 : 100	2 : 100		3 : 100			
			50	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5	7		8			
			51	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	10		15			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
							2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
6	Program 2.1.4.6	Pendidikan Politik Masyarakat	52	Persentase Partisipasi Pemilu	%	Pilwalkot = 75,35% Pilgub = 75,37% Pilpres = 83,87	0	300.000.000	0	750	Badan Kesbangpol	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			53	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	%	39,90	0		0			
7	Program 2.1.4.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	54	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif	%	2018 = 45 2019 = 50	60	1.853.499.900	65	750	DPMPPA	
			55	Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rasio	2018 = 1 : 60 2019 = 1 : 55	1 : 45		1 : 40			
8	Program 2.1.4.8	Pemberdayaan lembaga Sosial	56	Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	43	55	9.119.949.000	60	11.653	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
5	Program 2.1.2.5	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	57	Jumlah Konflik SARA	angka	0	0	1.847.000.000	0	3.600	Badan Kesbangpol	
			58	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	rasio	3950 orang	12,75		13			
			59	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	%	100	100	365.907.000	100	1.815	Humas dan Protokol	
2.2	Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>) ,	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB		A			
			2	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Integrative		Integrative			
2.2.1	Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB		A			
1	Program 2.2.1.1	Penerapan Reformasi Birokrasi	60	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,31	3,35	900.000.000	3,4	1.075	Bagian Organisasi	Penguatan Reformasi Birokrasi
			61	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	B	BB		A			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
			62	Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi	Point	3,84	4,25		4,5			Penguatan Reformasi Birokrasi
			63	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	18,92	70,27	38.944.000	100	21	Inspektorat	
2	Program 2.2.1.2	Pengendalian pembangunan	64	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	%	80	83	551.094.600	85	750	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan	
			65	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	75	85	150.000.000	90	300	Bappeda	
3	Program 2.2.1.3	Perencanaan Pembangunan Daerah	66	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Angka	21	23	0	24	300		
4	Program 2.2.1.4	Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	67	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	77	1.734.021.450	80	1750		
5	Program 2.2.1.5	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	68	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,7	78	400.000.000	80	673	Bappeda	
6	Program 2.2.1.6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	69	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	79	66.900.000	80	200		
7	Program 2.2.1.7	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Point	3,1	3,15	109.000.000	3,17	185	Bagian Administrasi Pemerintahan	
			71	Presentase BUMD yang Sehat	%	50	50	414.974.000	50	500	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	
8	Program 2.2.1.8	Kerjasama Pembangunan	72	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	%	70	75	436.000.000	80	1.075	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
							2018	2021		2022			
								Target	Rp. (dln Juta)	Target			Rp. (dln Juta)
			73	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	10	18.000.000	10	130	Bappeda		
9	Program 2.2.1.9	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	74	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	%	100	100	180.000.000	100	2.020	Bagian Administrasi Pemerintahan		
				presentase masalah pertanahan yang termediasi	%	100	100		100	250			
10	Program 2.2.1.10	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	75	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	%	70	76	265.000.000	81	850			
11	Program 2.2.1.11	Penataan Perundang-undangan	76	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	90	95	514.685.000	95	1.425	Bagian Hukum dan HAM		
12	Program 2.2.1.12	Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM	77	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100	385.315.000	100	1.000			
13	Program 2.2.1.13	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	78	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100	100	4.783.415.000	100	4.210	Bagian Humas dan Protokol : dan Bagian Umum		
14	Program 2.2.1.14	Peningkatan Sadar Tertib Arsip	79	PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)	%	17	38	391.597.000	58	255	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
15	Program 2.2.1.15	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	80	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	arsip	100	100	120.151.619	100	125			
16	Program 2.2.1.16	Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	81	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	%	80	80	14.224.680.000	85	10.297	Setwan		
			82	Persentase Perda yang Disosialisasikan	%	100	100		100				
			83	Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas	%	70	82		83				

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
							2018	2021		2022			
								Target	Rp. (dln Juta)	Target			Rp. (dln Juta)
17	Program 2.2.1.17	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	84	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	%	100	100	0	100	11,35	BKPSDA	Penguatan Reformasi Birokrasi	
18	Program 2.2.1.18	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	85	Persentase Pemenuhan Formasi ASN	%	55	63	3.327.906.009	66	3.420	BKPSDA	Penguatan Reformasi Birokrasi	
			86	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan	%	75	83	86					
			87	Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	%	85	91	92					
			88	Persentase Pengelolaan Administrasi Kpegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu	%	100	100	100					
19	Program 2.2.1.19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	%	30	40	5.650.000.000	45	5.762	BKPSDA	Penguatan Reformasi Birokrasi	
			90	Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	68	77,5	80					
			91	Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat Fungsional	%	60	79	81					
			92	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	85	89	91					
20	Program 2.2.1.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	93	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	270.286.293.060	100	51.345	Seluruh Perangkat Daerah	Penguatan Reformasi Birokrasi	
21	Program 2.2.1.21	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	94	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	85	107.666.685.366	90	51.403			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
							2018	2021		2022			
								Target	Rp. (dln Juta)	Target			Rp. (dln Juta)
22	Program 2.2.1.22	Peningkatan Pelayanan PATEN	95	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	%	80	85	77.137.767.300	87	55.461	Kecamatan	Penguatan Reformasi Birokrasi	
			96	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Point	3	3,2		3,3				
23	Program 2.2.1.23	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	97	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	1.156.125.000	WTP	165	Inspektorat		
			98	Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan	%	100	100		100	230			
			99	Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat	%	100	100		100				
			100	Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100		100				
			101	Level Maturitas SPIP	Level	1	3		3	300			
			102	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	43,24	48,65		51,35				
			103	Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	Elemen	3	3		4	350			
			104	Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM	Angka	7	8		8				
			105	Jumlah PD berpredikat WBK	%	0	1		1	125			
24	Program 2.2.1.24	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	106	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100	100	1.055.786.000	100	3750	BPKAD		
25	Program 2.2.1.25	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	107	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80	82	3.325.454.000	83	5750	BPKAD		
26	Program 2.2.1.26	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	108	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90	56.528.320.860	95	3.750	Seluruh Perangkat Daerah		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
			109	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	BB		BB			Penguatan Reformasi Birokrasi
			110	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	85		90			
27	Program 2.2.1.27	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	111	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,91	2,92	9.600.412.000	2,93	14.840	Dinas Kominfostandi	
			112	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	%	7	21		28	4080		
			113	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	90	5.807.469.000	95	13.902	Seluruh Perangkat Daerah	
			114	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100		100			
28	Program 2.2.1.28	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	115	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	NA	Level 1	226.630.000	Level 2	1.200	Dinas Kominfostandi	
29	Program 2.2.1.29	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	116	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	73	547.129.000	76	4.600		
30	Program 2.2.1.30	Pengembangan Data dan Informasi	117	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media Elektronik	%	50	60	1.517.684.000	65	4.357	Seluruh Perangkat Daerah	
			118	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	60		65			
			119	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90		95			
31	Program 2.2.1.31	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	3,31	3,35	736.890.000	3,4			
32	Program 2.2.1.32	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa	120	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa	Indeks	8,53	10	972.400.000	10	2.800	Bagian Pengadaan Barang/jasa	
33	Program 2.2.1.33	Kerjasama Informasi dengan Media massa	121	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	91,9	100	4.032.167.000	100	5324	Bagian Humas dan Protokol	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
	SASARAN 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	122	Level Kematangan Smart City	Level	scattered	Scattered		Integrative			
1	Program 2.2.2.1	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	123	persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	Jumlah UMKM keseluruhan = 11.336	10	100.000.000	15	100	Dinas Koperasi dan UMKM	Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal
2	Program 2.2.2.2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	124	Prosentase pemanfaatan E Commerce oleh IKM	%	Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang sudah menggunakan E commerce = 44 Persentase pemanfaatan E commerce = 4,4 %	5,94	450.000.000	6,53	340	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	Program 2.2.2.3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	125	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya	%	Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri = 20 Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi = 2%	3	80.000.000	3,5	900		
4	Program 2.2.2.4	Peningkatan Kreatifitas dan daya saing Ekonomi Kreatif	126	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	NA	3	287.691.000	3,5	400	Dinas pariwisata dan Kebudayaan	
5	Program 2.2.2.5	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	127	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	Layanan	1	1	700.000.000	1	350	Dinas LH	
6	Program 2.2.2.6	Pemberdayaan usaha Ekonomi Masyarakat	128	Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	%	2018 = 0 2019 = 11,5	18,5	699.675.000	23,5	450	DPMPA	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp. (dln Juta)	Target	Rp. (dln Juta)		
7	Program 2.2.2.7	Pengembangan Komunikasi, Infomasi, dan Media Massa	129	Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi	Layanan	0	1	-	1	400	Dinas PUPR	Penguatan Reformasi Birokrasi
			130			0	1	1	150	Dinas Perumkim		
			131			1	3	3	7.564	Dinas Perhubungan		
			132			1	1	1	1.900	Bapenda		
			133			1	1	1	300	BPBD		
			134							Dinas Kesehatan		
			135			1	1	1	820	Dinas Pendidikan		
			136	Jumlah layanan kehumasan dan keprotokolalan	Layanan	91,9	100	100	3.025	Humas dan Protokol		
8	Program 2.2.2.8	Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	137	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke Masyarakat	%	100	100	100.000.000	100	200	BPBD	
9	Program 2.2.2.9	Pemulihan pasca Bencana	138	PersentaseKetersediaan data dan informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana	%	100	100	175.000.000	100	100	BPBD	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
10	Program 2.2.2.10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	139	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	1.021.000.000	< 24 Jam	850	BPBD	
11	Program 2.2.2.11	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	140	Respon time penanganan kebakaran	Menit	30	15	0	14	150	SatpolPP	

PENJABARAN MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA SEJAHTERA

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL					Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
				2018	Target Kinerja		2022				
					Target	Rp.	Target	Rp. (dlm Juta)			
3	Misi 3 : MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA										
	Tujuan 3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Gini Rasio	Point	0.41	0.39		0.38		
			2	Indeks Kebahagiaan	Point	NA	71-72		72-73		
	SASARAN 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,28	8,22		7,97		
1	Program 3.1.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90,38	91,87	2.281.713.000	92,20	4.253	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2.189	2.500		2.500		
			3	Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja	KK	2018 = 26 2019 = 26	30		30		
2	Program 3.1.1.2	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	109.416	132.393	167.690.000	145.633	800	
			2	Penetapan besaran UMK	Rp	3.557.146	4.481.780		4.840.322		
			3	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100		100		
3	Program 3.1.1.3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Juta/pekerja/tahun	63,91	68,59	80.500.000	71,52	78	
4	Program 3.1.1.4	Pembinaan dan penempatan transmigrasi	5	Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	KK	0	2	351.930.000	2	305	
5	Program 3.1.1.5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	6	Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM	orang	-	600	250.000.000	600	200	
6	Program 3.1.1.6	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	7	Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM	orang	Jumlah tenaga kerja UMKM = 39.982	360	3.107.000.000	360	2.800	
7	Program 3.1.1.7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	8	Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi	orang	Jumlah tenaga kerja koperasi = 500	250	2.618.000.000	250	2.750	
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	Jumlah UMKM keseluruhan = 23.706	180	-	180	6.600	
8	Program 3.1.1.8	Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	9	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	orang	245	40	-	50	950	
9	Program 3.1.1.9	Kepemudaan dan Keolahragaan	10	jumlah wirausahaan muda pemula	orang	-	100	0	100	150	
	SASARAN 3.1.2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	5,93	5,78		5,53		
1	Program 3.1.2.1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	14	persentase jumlah fakir miskin	%	jumlah KK Miskin = 72.187 jumlah Penduduk Miskin = 321,250 jiwa	5,78	117.000.000	5,53	5.366	Dinas Sosial
			15	persentase jumlah PMKS yang tertangani	%	Jumlah PMKS yang ditangani = 55734, Jumlah PMKS keseluruhan = 60944 (91,45%)	93%		94%		
2	Program 3.1.2.2	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	16	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	12 Jenis Lembaga	100	902.360.000	100	2.721	
			17	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	relawan yang aktif 268 orang, Total PSKS 1142 orang	32,22		36,60		
3	Program 3.1.2.3	Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat	18	Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi	%		5,02	-	7,53	1.750	
4	Program 3.1.2.4	Pendidikan Non Formal	19	Persentase Kelulusan Paket A, B, dan C	%		100	-	100	55	
			20	Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan	%	50	52		53		
			21	Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan	%	0	100		100		
5	Program 3.1.2.5	Manajemen Layanan Pendidikan	22	Jumlah beasiswa mahasiswa berprestasi miskin	mahasiswa	37	52	724.038.000	57	558	
7	Program 3.1.2.7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	23	Cakupan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	%	100	100	-	100	4.000	

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL						Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
				2018	2021		2022					
					Target	Rp.	Target	Rp. (dlm Juta)				
8	Program 3.1.2.8	Lingkungan Sehat Perumahan	24	Persentase RTLH	%	29,4	23,21%	660.000.000	21,23%	726	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	SASARAN 3.1.3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga (cara perhitungan mengikuti buku panduan Kementerian PMPPA, 2016)	Point		74-75		75-76			
1	Program 3.1.3.1	Pembangunan Keluarga	26	Persentase Keluarga Sejahtera	%	Jumlah Keluarga Sejahtera = 196.428 Jumlah Keluarga = 212.082 Persentase Keluarga Sejahtera = 92,62%	93,50	598.678.000	94,00	1.450	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			27	Persentase Anggota bina keluarga balita aktif	%	Anggota BKB Aktif = 7.521 Jumlah Anggota BKB Keseluruhan = 9.575 Persentase Anggota BKB Aktif = 78,54%	78,94%		79,14%			
			28	Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif	%	Anggota BKR Aktif = 3.702 Jumlah Anggota BKR Keseluruhan = 4.999 Persentase Anggota BKR Aktif = 74,05%	74,45%		74,65%			
			29	Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif	%	Anggota BKL Aktif = 5.366 Jumlah Anggota BKL Keseluruhan = 7.290 Persentase Anggota BKL Aktif = 73,60%	74,00%		74,02%			
			30	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	angka	22	24		25			
2	Program 3.1.3.2	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	31	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)	%	2018 = 75 2019 = 76	78	1.251.843.000	79	5.750	DPPMPA	
			32	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,025	0,0106		0,0105			
			33	Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya	%	2018 = NA 2019 = 1	3,10		4,65			
			34	Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	%	2018 = NA 2019 = 0,5	1,8		2,7			
			35	Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	%	0,0126	0,0127		0,0128			
3	Program 3.1.3.3	Penataan Administrasi Kependudukan	35	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	94%	96%	359.309.000	97%	400	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			36	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	31%	34%		35%	400		
			37	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99%	99,80%		100%	600		
			38	Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100%	100%		100%	300		
			39	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	1%	40%		50%	400		
4	Program 3.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan	40	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,6	76,79%	300.000.000	78,77%	484	Dinas Perumahan dan Permukiman	
5	Program 3.1.3.5	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan	41	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	%	76,61	85%	6.520.892.800	90%	5.203		
6	Program 3.1.3.6	Peningkatan Ketahanan pangan	42	Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	%	18,3	15,7	810.000.000	14,9	1.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			43	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2512,8	2400		2400			
			44	Ketersediaan Protein	Gr/Kapita/Hari	89,4	63		63			

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL					Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021		
				2018		2021		2022				
				Target	Rp.	Target	Rp. (dlm Juta)	Target			Rp. (dlm Juta)	
7	Program 3.1.3.7	Peningkatan Produksi Pertanian	45	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	Padri: 5439 Ton Palawija: 11.540 Ton Hortikultura: 28.972 Ton	6	1.825.000.000	8	4.033		Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal
			46	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	Daging: 5.999 Ton Telur: 93,5 Ton Susu: 1.929.316 Liter	4		6			
8	Program 3.1.3.8	Peningkatan Produksi Perikanan	47	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	Ikan Konsumsi: 4.980 Ton Ikan Hias: 18.578.560 ekor	4,5	300.000.000	6	810		
	Tujuan 3.2.	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6.14	6.75		6.84			
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6.14	6.75		6.84			
			2	PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Dalam Juta Rp.	37,99	42,73		45,1			
			3	Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	11.348	11.948		12.248			
			4	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19,68	22		23			
1	Program 3.2.1.1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	50	Nilai Investasi	Trilyun Rp.	3,1	#REF!	5.030.000.000	#REF!	12.055	DPMPSTP	Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal
			51	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	64	85		95			
2	Program 3.2.1.2	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	52	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	%	99.283.771,63	1,35	600.000.000	1,6	2075	Dinas	
3	Program 3.2.1.3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	53	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	Tahun 2018 = 2,99 Tahun 2017 = 5,58	5,6	765.000.000	5,61	24.678	Perindustrian dan Perdagangan	
4	Program 3.2.1.4	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	54	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	11630 UTPP	95,01	385.000.000	95,02	835	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama	
			55	Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	%	3,69	2-4 %	209.450.000	2-4 %	600		
5	Program 3.2.1.5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	56	Persentase peningkatan IKM yang produktif	%	1000 IKM	2,1	1.180.000.000	2,2	2970	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal
6	Program 3.2.1.6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	57	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.965.987	7.704.436	797.105.000	8.474.879	4.250	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
7	Program 3.2.1.7	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	58	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Rupiah	Jumlah omzet usaha Mikro = 2,3 T	81 M	-	95 M		Dinas Koperasi dan UMKM	
8	Program 3.2.1.8	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	59	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	418	500	2.800.000.000	500	1.204	Dinas Koperasi dan UMKM	
			60	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	418	150		150			
9	Program 3.2.1.9	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	61	Jumlah Koperasi Aktif	unit	528	588	150.000.000	618	8.850		
			62	Jumlah Koperasi berkualitas	unit	44	84		104			
10	Program 3.2.1.10	Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	63	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	70	80	-	85	500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
11	Program 3.2.1.11	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	64	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	75	80	-	85	325	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama	
12	Program 3.2.1.12	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	65	Nilai pajak daerah	dalam Juta Rp.	592.978	791.000	4.603.122.000	878.500	12.361	Bapenda	
			66	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	nilai realisasi pajak tahun 2018 = 592.978.746.864 target 2019 = 620.894.818.419		7,90		11,06		

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL Target Kinerja				Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	
						2018	2021		2022			
							Target	Rp.	Target			Rp. (dlm Juta)
			67	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dalam Juta Rp.	realisasi 2018 = 912.197.971.288 target 2019 = 944.394.650.807	1.127.767,17		1.241.375,86			
			68	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	nilai realisasi PAD tahun 2018 = 912.197.971.288	3,4		10,07			
	Sasaran 3.2.2.	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	0	40		60			
			2	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	0	40		60			
1	Program 3.2.2.1	Perencanaan Tata Ruang	70	Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM	%	0	40	1.750.000.000	60	5.400	Dinas PUPR	Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal
			71	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	85	100	300.000.000	100	100	Bappeda	
2	Program 3.2.2.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	72	Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%) Periode Tahun 2020-2024	%	0	40	0	60	350	Dinas PUPR	
			73	Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%) Periode Rencana 2020-2024	%	0	40		60			
3	Program 3.2.2.3	Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	74	Persentase Bangunan Gedung khusus/tertentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi	%	70	78	14.900.000.000	80	1400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal
4	Program 3.2.3.4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	75	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	%	80	84	-	86	800		
			76	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	%	90	92		94			
5	Program 3.2.2.5	Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	77	Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	%	90	90	-	90	324	SatpolPP	
			78	Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang	kawasan	10	2		2			
	Sasaran 3.2.3.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88,59	91		92			
			2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45	60		70			
	Program 3.2.3.1	Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	79	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	Km	268,336	270,336	69.500.000.000	271,336	296.372	Dinas PUPR	Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal
			80	Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	Km	78,3	7		7			
			81	Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	Km	0	2		3			
			82	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Km	15,14	3		3			
			83	Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	Angka	2	1		1			
			84	Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)	%	11	32,6		43,4			
			85	Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan	M	278	3		3			
	Program 3.2.3.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	87	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	%	88,59	89,25	32.110.000.000	89,5	68.720		
	Program 3.2.3.3	Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	88	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	50	70	200.000.000	80	1950		

No	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL		Target Kinerja			Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
						2018	2021		2022			
							Target	Rp.	Target	Rp. (dln Juta)		
	Program 3.2.3.4	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Trasportasi	89	Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik	%	70	80	5.525.000.000	85	10.900	Dinas Perhubungan	
	Program 3.2.3.5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	90	Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)	%	50	60	3.450.000.000	70	75.750	Dinas Perhubungan	
			91	Load Factor Angkutan Umum	%	40	50		55			
	Program 3.2.3.6	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	92	Konektivitas transportasi multimoda	Point	2	3	7.500.000.000	4	488.828		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, terdapat beberapa indikator sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Capaian Indikator Sasaran pembangunan tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2021 merupakan pencapaian kinerja pada akhir tahun 2020, karena perhitungan indikator sasaran didapatkan selama satu tahun anggaran, oleh karena itu selama pelaporan triwulan II tahun anggaran 2021 capaian indikator sasaran tersebut belum tersedia.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,69	73,61
2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rumah Tangga Ber-PHBS	%	68	66,30
		Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Poin	0,45	0,39
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	93,15	3,80
		Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67,47	70,90
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,44	2,3
		Persentase Reduksi Sampah	%	6,4	7,61
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Indeks Kualitas Air	Point	49,67	56,33
5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Indeks Kualitas Udara	Point	85,90	80,09
6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,91	6,12
7	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,63	10,33
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,41

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian
		Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	76,02	Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2020
		Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	67,77	Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2020
8	Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	56.31	Tidak dilaksanakan kegiatan perhitungan IPP Tahun 2020 karena refocusing anggaran akibat Covid-19
9	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Point	600-610	5.162
10	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	69.5	69,03
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	70,5	68,51
11	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	BB
12	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Level Kematangan Smart City	Level	Initiative	Integrative
13	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,47	12,68
14	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5.8	6,68
15	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga (cara perhitungan mengikuti buku panduan Kementerian PMPPA, 2016)	Point	73-74	85,2
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6.66	-0,53
		PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Dalam Juta Rp.	40,36	40,36

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Capaian
		Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	11.648	11.564
		Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	21,00	19,11
17	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	20	20
		Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	20	20
18	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	90	83,47
		Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	50	32

3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2021

Ringkasan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2021 (%)			
			Triwulan I		Triwulan II	
			K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			
A		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	15,31	145.536.125.512	29,73	472.466.119.431
1	1.01	Pendidikan	8,41	51.387.064.113	39,26	239.783.047.928
		Dinas Pendidikan	8,41	51.387.064.113	39,26	239.783.047.928
2	1.02	Kesehatan	39,03	71.414.388.171	50,65	163.313.666.476
		Dinas Kesehatan	2,00	13.591.564.821	23,25	96.285.104.847
		RSUD	76,05	57.822.823.350	78,05	67.028.561.629
3	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,41	5.967.418.002	9,73	26.200.258.059
		Dinas PUPR	2,41	5.967.418.002	9,73	26.200.258.059
4	1.04	Perumahan dan Permukiman	12,09	5.365.184.900	5,68	13.824.712.648
		Dinas Perumkim	12,09	5.365.184.900	5,68	13.824.712.648
5	1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	17,28	9.443.435.614	41,39	24.437.223.312
		Satpol PP	19,10	8.321.304.603	43,40	21.419.975.953
		BPBD	15,45	1.122.131.011	39,37	3.017.247.359
6	1.06	Sosial	12,64	1.958.634.712	31,67	4.907.211.008
		Dinas Sosial	12,64	1.958.634.712	31,67	4.907.211.008
B		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	11,87	61.722.178.313	29,71	152.371.876.365
7	2.07	Tenaga Kerja	14,60	1.457.759.027	37,21	3.714.183.287
		Dinas Tenaga Kerja	14,60	1.457.759.027	37,21	3.714.183.287
8	2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,04	1.647.740.374	37,24	5.455.261.319
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,04	1.647.740.374	37,24	5.455.261.319
9	2.09	Pangan	7,52	2.927.906.596	23,56	10.312.759.202
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7,52	2.927.906.596	23,56	10.312.759.202

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2021 (%)			
			Triwulan I		Triwulan II	
			K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			
11	2.11	Lingkungan Hidup	10,86	13.811.192.182	33,28	42.311.920.509
		Dinas Lingkungan Hidup	10,86	13.811.192.182	33,28	42.311.920.509
12	2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	11,00	1.979.804.083	24,00	6.174.503.249
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11,00	1.979.804.083	24,00	6.174.503.249
14	2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,67	1.245.076.258	27,08	3.488.697.740
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,67	1.245.076.258	27,08	3.488.697.740
15	2.15	Perhubungan	7,14	16.433.578.475	15,80	39.460.539.140
		Dinas Perhubungan	7,14	16.433.578.475	15,8	39.460.539.140
16	2.16	Komunikasi dan Informatika	15,18	3.542.759.768	46,5	10.199.356.903
		Dinas Komunikasi dan Informatika	15,18	3.542.759.768	46,5	10.199.356.903
17		Statistik	8,00	23.455.832	35,00	84.046.232
		Dinas Komunikasi dan Informatika	8,00	23.455.832	35,00	84.046.232
18		Persandian	16,00	36.706.400	48,00	79.376.400
		Dinas Komunikasi dan Informatika	16,00	36.706.400	48,00	79.376.400
19	2.17	Koperasi dan UKM	0,28	1.391.815.838	0,79	5.533.653.513
		Dinas Koperasi dan UKM	0,28	1.391.815.838	0,79	5.533.653.513
20	2.18	Penanaman Modal	2,00	1.775.214.022	8,00	4.765.036.847
		DPMPPTSP	2,00	1.775.214.022	8,00	4.765.036.847
21	2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	41,32	13.996.051.223	50,72	17.180.435.855
		Dinas Pemuda dan Olahraga	41,32	13.996.051.223	50,72	17.180.435.855
22	2.22	Kebudayaan	11,54	1.453.118.235	28,69	3.612.106.169
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11,54	1.453.118.235	28,69	3.612.106.169
23	2.23	Perpustakaan				
		Dinas Arsip dan Perpustakaan				

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2021 (%)			
			Triwulan I		Triwulan II	
			K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			
24	2.24	Kearsipan				
		Dinas Arsip dan Perpustakaan				
C		Urusan Pilihan	8,31	2.288.171.199	17,38	6.253.227.783
25	3.25	Kelautan dan Perikanan	0	14.391.000	0	53.300.000
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	14.391.000	0	53.300.000
26	3.26	Pariwisata	0,33	8.200.000	5,88	146.400.000
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,33	8.200.000	5,88	146.400.000
27	3.27	Pertanian	25	74.703.160	40,48	513.789.980
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25	74.703.160	40,48	513.789.980
28	3.30	Perdagangan	1,71	36.759.000	3,84	82.667.400
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1,71	36.759.000	3,84	82.667.400
29	3.31	Perindustrian	14,49	2.154.118.039	36,71	5.457.070.403
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	14,49	2.154.118.039	36,71	5.457.070.403
D		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	16,36	26.808.290.354	33,37	66.666.436.869
30	4.01	Sekretariat Daerah		6.515.672.869		25.276.792.327
		Sekretariat Daerah		6.515.672.869		25.276.792.327
31	4.02	Sekretariat DPRD	16,36	20.292.617.485	33,37	41.389.644.542
		Sekretariat DPRD	16,36	20.292.617.485	33,37	41.389.644.542
E		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	12,43	10.089.519.805	35,44	43.650.049.561
32	5.01	Perencanaan	14,86	2.273.594.264	38,87	5.948.105.767
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14,86	2.273.594.264	38,87	5.948.105.767
33	5.02	Keuangan	3,99	2.321.087.824	34,23	19.927.405.257
		Badan Pendapatan Daerah				
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	3,99	2.321.087.824	34,23	19.927.405.257

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2021 (%)			
			Triwulan I		Triwulan II	
			K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			
34	5.03	Kepegawaian	21,65	5.356.990.717	46,21	17.438.784.537
		BKPSDM	21,65	5.356.990.717	46,21	17.438.784.537
35	5.05	Penelitian dan Pengembangan	9,21	137.847.000	22,43	335.754.000
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,21	137.847.000	22,43	335.754.000
F		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	15,43	2.656.228.482	39,21	6.748.648.527
36	6.01	Pengawasan	15,43	2.656.228.482	39,21	6.748.648.527
		Inspektorat	15,43	2.656.228.482	39,21	6.748.648.527
G		Unsur Kewilayahan	21,06	34.480.824.811	41,55	67.930.896.673
37	7.01	Kecamatan	21,06	34.480.824.811	41,55	67.930.896.673
		Kecamatan Bogor Utara	40,85	10.063.967.898	48,23	11.881.791.928
		Kecamatan Bogor Selatan	14,35	5.546.818.037	37,13	14.350.227.932
		Kecamatan Bogor Timur	18,20	3.477.286.192	41,22	7.875.299.064
		Kecamatan Bogor Barat	15,33	6.142.206.333	39,01	9.452.249.351
		Kecamatan Bogor Tengah	25,00	5.039.236.248	50,00	12.688.647.589
		Kecamatan Tanah Sareal	12,60	4.211.310.103	33,69	11.682.680.809
H		Unsur Pemerintahan Umum	10,52	1.472.349.512	44,63	5.062.588.319
38		Kesatuan Bangsa dan Politik	10,52	1.472.349.512	44,63	5.062.588.319
		Badan Kesbangpol	10,52	1.472.349.512	44,63	5.062.588.319

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2021, untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kota Bogor, capaian kinerja sebesar 32,78% dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 821.149.843.528. Capaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 29,73% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 472.466.119.431, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar 29,71% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 152.371.876.365, Urusan Pilihan sebesar 17,38% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.253.227.783, Unsur Pendukung Urusan Pemerintah sebesar 33,37% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 66.666.436.869, Unsur Penunjang Urusan Pemerintah sebesar 35,44% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 43.650.049.561, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah sebesar 39,21% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.748.648.527, Unsur Kewilayahan sebesar 41,55% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 67.930.896.673, dan Unsur Pemerintahan Umum sebesar 44,63% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 5.062.588.319.

3.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Dukungan Pemerintah Kota Bogor dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional dituangkan dalam bentuk penyelarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi terhadap prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bogor menetapkan Program Pembangunan Daerah yang merupakan gambaran program-program prioritas di Kota Bogor. Program pembangunan daerah Kota Bogor ditetapkan melalui pendekatan *top-down*, *bottom-up*, politis, dan partisipatif. Dalam implementasinya, prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2021 perlu dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat Nasional sehingga tercipta pembangunan yang selaras dan bersinergi. Keterkaitan antar prioritas dapat dilihat dari kesinambungan poin-poin yang diprioritaskan pada seluruh level pemerintahan. Adapun keterkaitan antara prioritas Kota Bogor dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Sinergitas Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Barat,
dengan Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024

Prioritas Nasional Tahun 2020-2024		Prioritas Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP11'	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP8'	Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;	PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
		PP4'	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial		
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP5'	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP1'	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah		
		PP4'	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;		
		PP3'	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;		

Prioritas Nasional Tahun 2020-2024		Prioritas Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024	
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP9'	Pendidikan Agama dan Tempat ibadah Juara	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP5'	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;		
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP10'	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
					PK2
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP10'	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			PP6'	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;	PK2
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7'	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	PK3	Reformasi Birokrasi

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2021

Dalam RPJMN 2015-2018 disebutkan beberapa program yang berhubungan dengan Kota Bogor. Peninjauan ini dibutuhkan untuk melihat sinkronisasi program nasional dengan program pembangunan Kota Bogor dalam merespon deregulasi di level nasional. Beberapa program yang disebutkan dalam RPJMN 2015-2018 adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional yaitu pengembangan Kawasan strategis Nasional, salah satunya adalah Kawasan Bodebekpunjur (Kota

Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur).

2. Kota Bogor, Depok, dan Bekasi: Kota satelit utk mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Jakarta; Simpul pelayanan dan jasa perkotaan; perdagangan dan jasa serta industri padat tenaga kerja.
3. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, yaitu memiliki fungsi peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir.

Merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, visi Pembangunan Jawa Barat pada periode waktu yang sama adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Visi ini memiliki makna yaitu :

1. Jabar Juara Lahir Batin Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri
2. Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan
3. Kolaborasi Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Mengacu pada Formulir E.60 (Evaluasi terhadap RKPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam pengisiannya, Perangkat Daerah seharusnya menyebutkan faktor pendorong keberhasilan pencapaian yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target, serta mengisi faktor penghambat pencapaian kinerja yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Sangat disayangkan, hanya sedikit Perangkat Daerah yang melengkapi pengisian faktor pendorong dan penghambat, padahal substansi ini sangat penting untuk membantu dalam perumusan solusi sehingga masalah yang terjadi dapat tertangani secara tepat.

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan triwulan II tahun 2021, secara umum beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan
2. Anggaran dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dimana Ketika anggaran yang diberikan mencukupi maka dapat mendorong ketercapaian kinerja program dan kegiatan sedangkan ketika anggaran yang diberikan kurang dari cukup, maka dapat menjadi penghambat keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
3. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
4. LAKIP instansi pada tiap satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator

kinerja sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.

5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalannya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik
6. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
7. Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan
8. Paradigma pemerintah daerah dalam proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan
2. Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
3. Kejadian tidak terduga merupakan kejadian yang tidak diduga akan terjadi pada tahun perencanaan, misalnya bencana alam, wabah, dan lain sebagainya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
4. Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu
5. Lemahnya/kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
6. Kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung kinerja pegawai

7. Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait
8. Keterbatasan SDM personal
9. Rendahnya/terbatasnya kapasitas fiskal APBD
10. Transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan.

4.2. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan II tahun 2021, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada triwulan atau RKPD berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan.
2. FGD di Bidang-Bidang Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang.
4. Diklat teknis terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 Triwulan II dilakukan untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan publik yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana, identifikasi permasalahan dan penyebab permasalahan, faktor-faktor penentu keberhasilan, faktor penghambat keberhasilan, serta rekomendasi dan tindak lanjut atas temuan dari hasil evaluasi hingga Triwulan II.

Evaluasi Triwulan II terhadap RKPD 2021 dibutuhkan untuk memperbaiki dan memberikan masukan serta intervensi pada pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor di triwulan berikutnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran selama triwulan II tahun anggaran 2021 lebih banyak kepada ketersediaan pendukung kegiatan antara lain: kondisi pandemi yang menyebabkan pembatasan pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia yang kompeten, data/informasi yang tersedia, sarana dan prasarana penunjang pekerjaan, serta kurangnya pembinaan kepada pelaksana kegiatan, khususnya dari atasan kepada bawahan.

5.2 REKOMENDASI

Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 untuk triwulan atau RKPD berikutnya adalah:

1. Pembuatan sistem/aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi agar memudahkan evaluasi yang dilakukan
2. Meningkatkan konsistensi dalam penyusunan rencana maupun indikator pengukuran kinerja dalam setiap dokumen perencanaan. Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan keuangan agar konsisten antara RPJMD, Renstra, Renja PD, dan RKPD sesuai cascading penyetaraan nomenklatur lama dan baru
3. Menambah atau meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan, perencanaan program dan kegiatan agar lebih akurat dan pendanaan yang tepat
4. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh perangkat daerah

secara berkesinambungan

5. Perlu adanya kerjasama Perangkat Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan ketelitian dalam pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara cermat dan tepat waktu
6. Pembinaan kepada pegawai
7. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada triwulan selanjutnya



Pemerintah Kota Bogor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah